

ABSTRAKSI

Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tidak bisa dianggap kecil, oleh karena itu perlu digali potensinya agar penerimaan selalu meningkat sebagai penyumbang kontribusi pembangunan propinsi DKI Jakarta tercapai target yang ditetapkan.

Metode Analisis yang digunakan penelitian adalah Deskriptif yaitu melakukan analisa data dengan cara mendiskripsikan data kualitatif maupun kuantitatif secara statistik berupa tabel-tabel dan pembuatan grafik guna untuk mengetahui gambaran secara jelas tentang gejala dan fenomena perkembangan penerimaan pajak daerah dan Retribusi sebagai kontribusi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan temuan-temuan bahwa pajak daerah di DKI Jakarta didominasi oleh ketiga jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, hal ini terbukti pada tahun 2011 penerimaan ketiga pajak tersebut mencapai Rp11.075.061.359.562, Tahun 2012 Rp12.839.225.547.317, mengalami kenaikan 13,7% sedangkan pada tahun 2013 Rp14.777.065.409.063 mengalami kenaikan 13,11%, dalam hal ini karena diakibatkan semakin bertambahnya unit kendaraan yang sangat ekstrim, dan semakin meluasnya area kebutuhan pemukiman warga. Sedangkan untuk Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan 0% karena belum adanya mekanisme yang tepat dalam pemungutannya kalau ditinjau dari hasil penjualan Rokok dan pemanfaatan air yang ada di Jakarta sangat luar biasa omzetnya.

Sedangkan untuk penerimaan Retribusi didominasi oleh Retribusi perizinan tertentu terutama perizinan trayek merupakan retribusi yang paling besar dipungut, sementara perizinan lainnya masih relatif minim dan tidak dipungut secara konnsisten dalam setiap bulan selama periode tahunan. Peneliti menduga bahwa mekanisme pemungutan terhadap retribusi tidak disertai dengan peringatan yang keras dan sanksi yang berat.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan Regulasi dan Revsi terhadap peraturan dan mekanisme tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, sehingga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah secara efektif tepat pada sasaran dan efesien dalam pembiayaan dan birokrasi.

ABSTRACTION

Local tax and local Retribution revenues are one source of revenue that cannot be considered as small, and therefore need to be explored to its potential as a contributor to revenues increased for the contribution of DKI Jakarta provincial development on achieving the target set.

The analytical method used to analyze the data is descriptive analysis in which to describe the qualitative and quantitative data in the form of statistical tables and graphing to determine a clear viewpoint of the phenomenon and the phenomenon of the development of local tax and retribution revenues as Jakarta provincial developmental contribution.

The results of the study was obtained that local tax in Jakarta is dominated by three types of taxes, namely taxes on motor vehicles, BBN of motor vehicle, and tax fees for acquisition of land and buildings, it is proved in tax revenues in 2011 reached Rp. 11.075.061.359.562, in 2012 Rp. 12.839.225.547.317, increased 13.7%, while in 2013 Rp. 14.777.065.409.063, increased 13,11 %, in this case because the result of the increasing number of vehicles are very extreme and ever-expanding needs of residential areas. Whereas for cigarette tax and tax of surface water are 0% due to the lack of proper mechanisms on each levied in terms of the sale of cigarettes and the use of water in Jakarta is remarkable turnover.

Whereas for the retribution acceptance is dominated by certain licensing stretch is particularly greatest retribution collected, while other permits are still relatively low and not collected consistently in each month during the annual period. Researchers suspect that the charge against the retribution mechanism is not accompanied by a strong warning and severe sanctions.

Therefore DKI Jakarta provincial government needs to make Regulation and Revisions to the rules and mechanisms of the Local Taxes and Retribution collection, so that will impact revenue rising right on target effectively and efficiently in financing and bureaucracy.